***AR-RIDDAH MENJADI ALASAN AT-TALAQ PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM (ANALISIS MAQASID AS-SYARI'AH)***

Aditya Abdi Pangestu

Uin Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Indonesia
adhietzelbaentanny@gmail.com

Received: 11-06-2019; Revised: 14-06-2019; Accepted: 20-12-2019

ABSTRACT

Religion has become a tendency for some modern societies, one of which is apostasy in matters of marriage. About the Indonesian legal context regarding marriage, one of them has been regulated by the Compilation of Islamic Law (KHI). Compilation of Islamic Law (KHI) in Article 116 concerning the termination of marriage, the letter "h" which reads "Transition of religion or apostasy which leads to disharmony in the household". But in reality, there are still a lot of people doing marriages of different religions or married marriages and in them, the ones that initially turned to Islam were, for example, Christians, Protestants or others. As a result of the conversion of religion or apostasy, it does not make it a family imbalance but instead creates a harmony in the family such as tolerance in religion. The purpose of this study is to explore the basis for consideration of Article 16 letter "h" Compilation of Islamic Law broadly. Maqasid as-Syari'ah is mapped to see from the level of maslahat and mafsadat, among others; maslahat in the level of pilgrimage because even though the family of a husband or his wife apostates still causes benefit, namely peace and harmony in the householder based on tolerance. Including is Khassah. Whereas the harm in the dharuriyah level is due to the many disputes committed by apostates in marriages that violate al-kulliyat al-khamsah, then the is included in the category 'ammah, because it does not provide specific restrictions which are feared to lead to ease in transition/conversion. If seen from the level of the maqasid as-syari'ah hierarchy, then the higher dharuriyah.

INTISARI

Berpindah-pindah agama telah menjadi kecenderungan sebagian masyarakat modern, salah satunya murtad dalam urusan perkawinan. Berkenaan dengan konteks hukum Indonesia tentang perkawinan, telah di atur salah satunya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 116 tentang putusnya perkawinan, huruf "h" yang berbunyi "Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga". Tetapi pada kenyataannya masih banyak orang-orang melakukan perkawinan beda agama atau perkawinan yang sudah menikah lalu di dalamnya yang awalnya Islam beralih menjadi misalnya Kristen, Protestan atau lain-lain. Akibat dari peralihan agama atau murtad ini, tidak menjadikannya suatu ketidakrukunan dalam berkeluarga, tetapi malah menimbulkan suatu keharmonisan dalam berkeluarga seperti toleransi di dalam beragama. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi dasar pertimbangan Pasal 16 huruf "h" Kompilasi Hukum Islam secara luas. *Maqasid as-Syari'ah* dengan dipetakan melihat dari tingkat *maslahat* dan *mafsadatnya*, antara lain; *maslahat* dalam tingkatan *hajiyat* dikarenakan sekalipun dalam berkeluarga suami atau isterinya murtad masih menimbulkan kemaslahatan yaitu ketentraman

dan keharmonisan dalam berumah tangga dengan didasari rasa toleransi. Cangkupannya adalah *Khassah*. Sedangkan *mudharatnya* dalam tingkatan *dharuriyah* dikarenakan banyak sekali *kemafsadatan* yang dilakukan orang murtad dalam perkawinan hingga melanggar *al-kulliyat al-khamsah*, lalu cangkupannya masuk dalam kategori '*ammah*, karna tidak memberikan batasan-batasan secara spesifik dikhawatirkan menimbulkan kemudahan dalam peralihan/perpindahan agama. Jika dilihat dari tingkatan hierarki *maqasid as-syari'ah* maka *dharuriyah* yang lebih tinggi.

Kata Kunci: *Ar-Riddah, At-Talaq*, Kompilasi Hukum Islam, *Maqasid As-Syari'ah*

A. Pendahuluan

Tidak sedikit orang yang berpandangan bahwa masuk dan keluar dari suatu agama adalah hak privat yang melekat pada setiap orang. Tidak ada otoritas di luar diri seseorang yang boleh memaksa orang lain untuk menetap atau keluar dari suatu agama. Dengan perkataan lain, setiap manusia bebas dan merdeka untuk memilih atau keluar dari suatu agama. Itu sebabnya dalam masyarakat modern, kita kerap menyaksikan fenomena sekelompok orang yang dalam hidupnya ber kali-kali melakukan migrasi dari satu agama ke agama lain. Bahkan dalam beberapa kasus, satu rumah keluarga dihuni oleh anggota keluarga yang berlainan agama. Berpindah-pindah agama telah menjadi kecenderungan sebagian masyarakat modern.

Namun, dalam kasus Islam, soal pindah agama itu bukan perkara sederhana. Banyak ulama yang memandang negative terhadap orang pindah agama. Khususnya dalam perkawinan, seperti diketahui perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang mana dengan adanya suatu perkawinan akan menimbulkan suatu akibat ikatan lahir bathin diantara keduanya. Perkawinan bukan saja menyangkut hubungan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan melainkan seluruh keluarga besar yang memiliki hubungan nasab keluarga. Selain itu perkawinan yang terjadi tidak hanya melibatkan hubungan antara manusia dengan manusia (*hablu min annas*), melainkan melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT (*hablu min Allah*).¹

Murtad adalah berpindah agama dari agama Islam menuju agama lain atau tidak beragama sekalipun. Menurut Syafi'iyah dan Hanabillah, murtad yaitu memutus atau keluar dari agama Islam baik dengan niat perbuatan maupun perkataan. Sebagaimana dengan agama-agama lainnya, maka agama Islam menghadapi dengan secara tegas kepada orang-orang yang keluar dari agama Islam. Bahkan orang yang keluar dari agama Islam dapat diancam hukuman mati.²

Berhubungan dengan murtad dalam perkawinan, jelas jika suami atau isteri murtad maka pernikahan keduanya secara otomatis *Fasakh*, tanpa membutuhkan putusan hakim untuk memisahkan keduanya. Dikarenakan berbeda keyakinan akan merusak suatu ikatan yang dinilai *misaqan ghaliza*.³

¹ "Diana Aristanti, Dkk, 'Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 02449/Pdt. G/2016/PA.Pal),' dalam *Jurnal Lentera Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember Vol 2 (January 2017), hlm. 18

² Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, terjemahan H. Zaini Ahmad Nuh (Jakarta: Intermasa, 1980), hlm. 213

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)* (Yogyakarta: ACAdeMiA, 2013), hlm. 27

Berkenaan dengan konteks hukum Indonesia tentang perkawinan, telah di atur di dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Murtad tidak diatur secara spesifik dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 1974. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mayoritas Umat Muslim berpedoman pada itu mengatur tentang Murtad, pada pasal 116 tentang putusnya perkawinan, huruf “h” yang berbunyi “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

Tetapi pada kenyataannya masih banyak orang-orang melakukan perkawinan beda agama atau perkawinan yang sudah menikah lalu di dalamnya yang awalnya Islam beralih menjadi misalnya Kristen, Protestan atau lain-lain. Akibat dari peralihan agama atau murtad ini, tidak menjadikannya suatu ketidakrukunan dalam berkeluarga, tetapi malah menimbulkan suatu keharmonisan dan kelanggengan dalam berkeluarga seperti toleransi dalam beragama. Banyak sekali contoh-contoh yang dapat kita temukan salah satunya seperti artis Novita Angie bersama Sapto Haryo Rajasa. Angie adalah isteri yang beragama Kritisen sedangkan suaminya Sapto Haryo Rajasa adalah beragama Islam (Muslim).⁴ Berdasarkan latar belakang di atas maka muncullah suatu permasalahan, antara lain : *Pertama*, Mengapa Murtad menjadi alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?, *Kedua*, Bagaimana Murtad (*ar-Riddah*) menjadi Alasan Perceraian (*at-Talaq*) prespektif *Maqasid as-Syariaht* ?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta obyektif yang ditanyakan dalam pokok masalah.⁵ Penelitian ini berskala pustaka (*library research*) yakni penelitian dalam serangkain kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca serat mengolah bahan penelitiannya. Berkaitan dengan menelaah bahan-bahan dari buku utama yangdengan masalah dan buku penunjang lainnya berkaitan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menelaah ketentuan Pasal 6 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pendekatan *normatif* digunakan untuk menelaah ketentuan *ar-Riddah* menjadi alasan *at-Talaq* dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan analisis *Maqasid as-Syari'ah*. Dalam hal ini penulis menggunakan norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam berupa al-Qur'an dan al-Hadist. Teknik pengumpulan data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder, yakni bahan primer meliputi Kompilasi Hukum Islam beserta penafsirannya dan Undang-undang yang terkait seperti Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Selanjutnya bahan sekunder sebagai penguat dari teori yang akan digunakan, untuk menjadi pisau analisis penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Pemaknaan Murtad beserta Implikasi Hukumnya

a. Pengertian Murtad

⁴ Winnetnews, <https://www.google.com/amp/s/m.winnetnews.com/menikah-beda-agama-dan-berpindah-agama-ini-tetap-awet/> (diakses 21 desember 2018).

⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm, 7.

Murtad dalam wacana fikih dipahami sebagai orang yang keluar dari islam dan berpindah memeluk agama lain.⁶ Jika seseorang yang murtad tetap berpaling setelah diminta bertobat, maka hukumnya adalah dibunuh. Pendapat tersebut salah satunya didasarkan pada hadis “من بدل دينه فالقتله”. Dengan demikian menurut hukum pidana islam tindakan murtad (*apostasy*) termasuk kategori *hudud*.⁷

Istilah murtad lebih dikenali di masyarakat apabila dibandingkan dengan istilah *riddah* yang dipakai dalam kitab fikih. Istilah *riddah* sepadan dengan istilah *munafiq* yang juga lebih populer daripada istilah *nifaq*, sedangkan kata *riddah* sama dengan kata *munafiq*. Keduanya berbentuk *isim fail*, sedangkan kata *riddah* sama dengan kata *nifaq* dan sama-sama bentuk *masdar*, yang artinya kembali.⁸ Menurut kamus al-Munawwir telah menyatakan *al-riddah* adalah bentuk masdar dari kata رد yang secara etismologinya berarti أرجع – صرف memalingkannya, mengembalikannya. Dan kalimat *al-riddah* juga mempunyai arti leksikal “الرجوع عن الشيء إلى غيره” kembali dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain.⁹

Secara terminologis, Menurut Dr. Abd. Karim Zaidan yaitu keluar daripada Islam. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah yaitu meninggalkan agama Islam dan keluar daripada (Islam) setelah menganutnya. Menurut Wahbah az-Zuhaili yaitu ia berpaling daripada Islam dan kembali pada kekufuran, sama dengan niat atau perbuatan yang mengkafirkan atau perkataan, dan sama ada diucapkan dengan gurauan atau penentangan atau *i'tiqad* (secara teologis). Ada juga sebagian ulama mengatakan itu dari syara' ialah orang kafir setelah Islam, walaupun ia *mumayyiz*. Hal ini dilakukan dengan sadar, meskipun sambil bercandaan.¹⁰

Tetapi menurut al-Mawardi, sedikit berbeda dari pengertian di atas, dia berpendapat sebagai berikut: (secara sosiologis) *ahl al-riddah* adalah orang yang keluar dari agama Islam, sekelompok orang dengan status hukum keIslaman yang pasti baik mereka lahir dalam keadaan fitrah (Islam) maupun mereka masuk Islam yang sebelumnya beragama lain. Terhadap kedua jenis kelompok orang ini berlaku ketentuan hukum tentang murtad dengan ketentuan hukum yang sama. Dan dia memaparkan pendapat di atas untuk membedakan antara jihad melawan kaum musyrik dan non musyrik. Adapun golongan yang termasuk kaum musyrik adalah kaum murtad, pemberontak dan perampok.¹¹

Sementara menurut Sayid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnnah, *riddah* adalah keluarnya seorang muslim yang telah dewasa dan berakal sehat dari agama Islam kepada kekafiran baik

⁶ Makhruh munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm 131

⁷ Abdur Rahman ibn Smith, “, ‘Rekontruksi Makna Murtad Dan Implikasi Hukumnya’,” dalam *Jurnal al-Ahkam, jurusan pemikiran hukum Islam*, Vol. 22, Nomor. 2, Oktober 2012, hlm. 178

⁸ Muhammad Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.76

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 10, (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 182

¹⁰ Siti Zailia, "Murtad Dalam Prespektif Syafi'i Dan Hanafi", Dalam *Jurnal Istimbath*, Fakultas Syari'ah, Vol. XIV, Nomor. 15, Juni 2015", hlm. 71

¹¹ *Ibid.*, 72.

dengan niat, dengan kehendaknya tanpa ada paksaan dari siapapun.¹² Bisa dikatakan *riddah* memiliki tiga unsur yaitu Pertama, pelakunya adalah seorang yang sehat dan dewasa. Kedua, *riddah* dilakukan atas dasar sadar diri sendiri dan bukan atas paksaan. Ketiga, *riddah* dilakukan baik dengan hati, perkataan dan perbuatan. Bahkan menurut Muhammad Abdu *riddah* ialah, keluarnya seseorang dari tiga dasar yang sangat fundamental yaitu; keluar dari keyakinan bahwa alam diatur oleh satu Tuhan, keluar dari keimanan kepada alam ghaib dan kehidupan dunia akhirat, serta keluar dari amal saleh yang bermanfaat bagi manusia dan masyarakat. Kategori riddah pertama bersifat teologis (*rububiyyah*), yang kedua eskatologis, dan terakhir bersifat destruktif.¹³ Kesimpulannya dari pada pengertian diatas, orang murtad adalah seorang muslim *mukallaf* yang keluar dari agama Islam dibarengi dengan kepercayaan, perkataan atau perbuatan dengan kehendak sendiri. Dan perkataan murtad membawa maksud keluar dari berpegang dengan agama Islam tanpa mengira apa jenis sekalipun agama yang bukan Islam.

b. Macam-macam Murtad

Jarimah murtad meliputi dua unsur, yaitu keluar dari agama Islam lalu menuju kekafiran dan melawan hukum :¹⁴

1) Keluar dari agama Islam kemudian menuju kekafiran ada empat, antara lain :

a) Dengan tindakan (perbuatan)

Maksudnya yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina, meremehkan atau menentang Islam. Misalnya menganggap zina, minum khamar, dan membunuh sebagai perbuatan halal dan bukan atas dasar ta'wil (al-Qur'an dan Hadis).¹⁵ Sedangkan Shata ad-Dimyati menyebutkan termasuk murtad *bi al-fi'li* adalah bersuju pada patung, matahari, atau yang lain.¹⁶

b) Dengan ucapan (perkataan)

Maksudnya seseorang dapat menjadi kafir apabila ia mengatakan bahwa Allah bukanlah Tuhan, Allah itu tidak Esa, Allah memiliki tandingan, pasangan dan anak, malaikat dan nabi itu tidak ada.¹⁷ Sedangkan Shata ad-Dimyati mencontohkan beberapa perkataan yang menyebabkan kemurtadan seseorang memanggil orang Islam dengan panggilan “Wajai Kafir”, dan segi perkataan “Allah menyiksaku karena tidak mengerjakan salat padahal aku sakit, maka Allah zalim padaku”, dan juga “Salat tidak cocok untukku”, “saya tidak menemukan kebaikan sepanjang aku salat”, mencaci seseorang yang namanya sama dengan nabi Muhammad SAW dengan maksud mencaci

¹² Abdur Rahman ibn Smith, “Rekontruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya”, dalam *Jurnal al-Ahkam*, hlm. 181.

¹³ *Ibid*, hlm. 182.

¹⁴ Muhammad nurul irfan, *fiqh jinayah.*, hlm. 79

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Abd. Moqsith, “Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam”, Dalam *Jurnal Ahkam*, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Vol. XIII, Nomor. 2, Juli 2013”, hlm. 291

¹⁷ Muhammad nurul irfan, *fiqh jinayah.*, hlm.81.

nabi, meremehkan fatwa ulama' dengan maksud meremehkan syari'at, menyerupakan wajah orang saleh dengan babi. Perkataan seseorang "saya menginginkan sejumlah harta, baik yang halal maupun yang haram", tidak merespon azan dan tidak mendengarkan ketika al-Qur'an dilantunkan, mencaci para sahabat Nabi.¹⁸

c) Dengan keyakinan (*i'tiqadi*)

Murtad juga dapat terjadi melalui keyakinan, seperti menyakini bahwa alam ini telah ada sebelum adanya Allah, Allah ada setelah adanya alam, antara khalik dan makhluk dapat bersatu, reikarnasi itu ada, al-Qur'an tidak berasal dari Allah, nabi Muhammad itu pembohong, dan Ali adalah titisan Tuhan.¹⁹ Adapun Shata ad-Dimyati memerinci beberapa hal yang termasuk murtad *i'tiqadi* ini, yaitu; meragukan Allah, meragukan Rasul, meragukan satu bagian dari al-Qur'an, tidak mempercayai hari akhir, tidak mempercayai surga dan neraka, tidak mempercayai konsep pahala dan dosa, tidak mempercayai satu sifat dari sifat-sifat Allah, menyakini kehalalan sesuatu yang diharamkan.²⁰

d) Dengan meninggalkan ajaran

Maksudnya menentang dan mengungkari syari'at Islam, seperti meninggalkan salat, puasa dan zakat dengan maksud menentang wajibnya ibadah-ibadah tersebut²¹.

2) Melawan Hukum

Seseorang yang sengaja mengucapkan atau melakukan apa yang sebelumnya terlintas dalam hatinya dan ia sadar hal itu akan membuatnya di anggap murtad. Sementara itu, bagi orang yang tidak mengerti bahwa hal itu dapat berakibat batal pada keimanannya, ia tidak di anggap murtad. Demikian pula orang yang secara tidak sadar mengucapkan "ya Allah, saya Tuhan dan engkau hamba", karena terlalu gembira atau terlalu sedih, hal itu tidak membuatnya murtad.²²

c. Murtad dalam Al-Qur'an dan Hadis

1) Al-Qur'an

Dalil hukuman Murtad dalam al-Qur'an dibagi dua, yaitu ungkapan langsung makna murtad dan ungkapan tidak langsung makna murtad.

a) Ungkapan langsung makna murtad

Al-Qur'an menunjukkan bahwa kata murtad tidak ditemukan di dalamnya secara literal (*lafziyyah*), melainkan dalam bentuk konotatif (*ma'nawiyah*). Makna konotatif masih dalam ruang bentuk derivasinya (*sifat*), beberapa ayat yang menunjukkan arti murtad, antara lain : Q.S. al-Ma'idah (5):54, Q.S. al-Baqarah (2):217, dan Q.S.

¹⁸ Abd. Moqsith, "Tafsir Atas Hukum Murtad dalam Islam", dalam *Jurnal Ahkam*, hlm. 291

¹⁹ Muhammad nurul irfan, *fiqh jinayah.*, hlm.82

²⁰ Abd. Moqsith, "Tafsir Atas Hukum Murtad dalam Islam", dalam *Jurnal Ahkam*, hlm. 291.

²¹ *Ibid.*

²² Muhammad nurul irfan, *fiqh jinayah.*, hlm.83.

Muhammad (47):25.²³ Penulis mengambil beberapa ayat tersebut yang tidak menggunakan term murtad.

i. QS. al-Ma'idah (5):54.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang beriman, siapa saja diantara kalian murtad dari agamanya maka Allah kelak akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mu'min, bersikap tegas kepada orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dan Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui”

Shihab ad-Din al-Alusi mencoba mencari korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Menurut dia, setelah pada ayat sebelumnya Allah melarang umat Islam menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai *awliya'*. Maka pada ayat ini Allah menegaskan bahwa sekiranya larangan itu dilanggar maka pelakunya akan terjatuh pada kemurtadan. Al-Alusi berkata bahwa konsistensi mereka menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai *awliya'* menyebabkan mereka murtad. Pendapat ini juga didukung oleh Fakhr ad-Din al-Razi, bahwa siapa saja yang menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya maka ia telah murtad dari agamanya (من يتول منكم الكفار فيرتد دينه).²⁴

Pendapat al-Alusi ini paralel dengan pendapat M.Quraish Shihab ketika dia berkata sanksi yang timbul akibat pelarangan tersebut adalah kemurtadan.²⁵ Menurut M.Quraish Shihab ayat ini memperingatkan:

Hai orang-orang yang beriman, siapa yang mengangkat non-Muslim sebagai awliya, maka itu dapat menjadikan yang bersangkutan murtad, keluar dari Islam dan barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, walau dalam bentuk rahasia dengan memusuhi para wali Allah dan mencintai musuh-musuh-Nya, maka kelak walau tidak segera Allah akan mendatangkan suatu kaum yang bertolak belakang keadaanya dengan mereka itu sehingga Allah mencintai mereka dengan melimpahkan aneka karunia-Nya dan mereka pun mencintai-Nya sehingga selalu berupaya mendekat kepada-Nya dengan amal-amal kebajikan. Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, dan bersikap tegas, kuat pendirian, dan tidak menoleransi dalam hal-hal prinsip

²³ Abdur Rahman ibn Smith, “Rekontruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya”, dalam *Jurnal al-Ahkam*, hlm. 187.

²⁴ Abd. Moqsith, “Tafsir Atas Hukum Murtad dalam Islam”, dalam *Jurnal Ahkam*, hlm. 284.

²⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*, Juz III, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 156

*terhadap orang-orang kafir. Mereka itu terus-menerus berjihad di jalan Allah tanpa pamrih dan tanpa jemu, dan mereka tidak takut pada satu celaan apapun dari pencela, walaupun celaan itu sangat buruk. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, karena itu berlomba-lombalah meraih anugerah itu dan Allah Maha Luas dan lagi Maha Mengetahui.*²⁶

Sementara Ibn Jarir at-Tabari mengatakan bahwa orang-orang Islam yang kembali kepada agama lamanya seperti Yahudi dan Nasrani, maka itu tidak akan berdampak buruk pada Allah. Alih-alih memberikan keburukan, maka Allah justru akan mendatangkan sekelompok orang yang mencintai Allah dan merekapun mencintai-Nya. Setelah terjadi kemurtadan di berbagai tempat pasca wafatnya Rasulullah, maka Allah membangun kekuatan dengan menghadirkan orang-orang penuh istimewa. Dikisahkan Qatadah seperti dinukil Ibn Jarir at-Tabari, bahwa ayat ini turun sebagai alarm bahwa kelak setelah Rasulullah wafat akan muncul kemurtadan yang merata di seluruh Arab. Pada zaman kekhalifahan Abu Bakar, sebagian umat Islam, misalnya hanya mau mendirikan salat dan tidak mau mengeluarkan zakat. Karena itu Abu Bakar memerangi mereka karena mereka dianggap telah menceraikan salat dan zakat. Abu Bakar berkata “وَاللّٰهُ لَا اَفِرُقْ بَيْنَ شَيْءٍ جَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا” demi Allah, aku tidak akan memisahkan sesuatu yang dipersatukan oleh Allah.²⁷

ii. QS al-Baqarah (2): 217.

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِۦٓ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Barangsiapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”

Ayat ini telah menegaskan bahwa seorang muslim yang meninggalkan agama Islam untuk menganut agama kafir dan terus tetap dalam kekafiran itu sehingga meninggal dalam keadaan kafir, maka seluruh amal kebaikan yang telah dilakukan sebelum ini akan sia-sia dan tidak akan memperoleh hasil dari amal kebaikan yang telah dilakukannya di dunia. Selain itu dia tidak berhak memperoleh hak yang dinikmati oleh kaum muslimin di dunia. Segala kenikmatan di akhirat juga tidak akan diperoleh.²⁸

Menurut Muhammad Rashid Rida lebih lanjut menyatakan bahwa ayat ini hendak menegaskan bahwa begitu seseorang memilih menjadi kafir dengan meninggalkan agama Islam, maka seluruh amal ibadah yang dilakukan ketika menjadi muslim akan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 157.

²⁷ Abd. Moqsih, “Tafsir Atas Hukum Murtad dalam Islam”, dalam *Jurnal Ahkam.*, hlm. 285.

²⁸ Muhammad Sayid As-Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Lubnan: Dar KutubArabi, 2009), hlm. 153.

batal dan terhapus secara keseluruhan. Dia mengutip pendapat ahli fiqh yang berkata bahwa amal kebaikan orang Islam yang memilih murtad hilang tidak tersisa, sehingga ketika yang bersangkutan kembali menjadi muslim maka wajib baginya mengulang ibadah haji yang telah dilakukan sebelum murtad. Bukan hanya itu, bahkan ketika si murtad telah diceraikan dari isterinya lalu ingin kembali pada Islam dan rujuk pada isterinya maka wajib baginya untuk menjalani nikah baru. Sementara menurut Ibn Jarir at-Tabari ayat ini menegaskan bahwa orang murtad meninggal dunia tanpa sempat bertaubat dan kembali pada Islam maka batallah seluruh amal ibadah yang pernah dilakukannya ketika menjadi muslim. Hal yang sama yang dikatakan Shihab ad-Din al-Alusi bahwa orang mati yang dalam keadaan murtad maka semua amal ibadahnya yang dilakukan ketika Islam seperti tidak pernah ada (شرط عمالهم الحسنة التي عملوها في حالة الإسلام)²⁹ (فاسدة بالمنزلة ما لم تكن).

b) Ungkapan Tidak Langsung makna Murtad

Adapun ungkapan tidak langsung yang dimaknai murtad adalah ayat-ayat yang secara redaksional tidak menggunakan term murtad dan atau derivasinya. Tetapi secara substansial menunjukkan makna murtad, seperti yang ditunjukkan oleh QS. Ali ‘Imran:86, 90, 106, 177, QS. an-Nisa’:137, QS. an-Nahl:106, dan QS. al-Hajj:11. Secara literal tidak satupun ayat tersebut menggunakan term murtad atau derivasinya. Namun secara substansial, ketujuh ayat itu mengisyaratkannya, isyarat tersebut mengambil empat bentuk kalimat. Pertama, beriman kemudian kafir (أمنوا ثم كفروا) seperti dalam surat an-Nisa’:137. Kedua, kafir sesudah beriman (كفروا بعد إيمانهم) seperti dalam surat Ali ‘Imran ayat 86,90, dan 106, serta an-Nahl:106. Ketiga, balik kebelakang (انقلب على) seperti dalam surat al-Hajj:11. Keempat, menukar atau mengganti iman dengan kekafiran (الكفر اشتروا بالإيمان) seperti dalam surat Ali ‘Imran:177.³⁰

Adapun berkaitan akan sanksi murtad dalam ayat-ayat tersebut, tidak satu pun bersifat fisik, melainkan non fisik. Mereka akan memperoleh kerugian di dunia dan di akhirat.³¹ Kerugian di dunia berupa Allah tidak akan mencintainya,³² sebaliknya mereka dimurkai,³³ tidak mendapat petunjuk atau hidayah,³⁴ dan seluruh amalnya dianggap sia-sia.³⁵ Sedangkan di akhirat kelak wajah mereka menjadi hitam³⁶ dan tidak akan mendapat ampunan,³⁷ sebaliknya yang mereka peroleh adalah siksa berat,³⁸ mereka dimasukkan kedalam neraka jahannam, mereka kekal didalamnya.³⁹

²⁹ Abd. Moqsith, "Tafsir Atas Hukum Murtad dalam Islam", dalam *Jurnal Ahkam* . hlm. 286.

³⁰ Abdur Rahman ibn Smith, "Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya", dalam *Jurnal al-Ahkam*, hlm .187.

³¹ Al-Hajj (22) :11

³² Al-Ma'idah (5) :54

³³ An-Nahl (16) :106

³⁴ An-Nisa' (4) :137, Ali Imran (3) :86

³⁵ Al-Baqarah (2) :217

³⁶ Ali Imran (3) :106

³⁷ An-Nisa' (4) :137

Dari semua ayat di atas maka al-Qur'an secara jelas tidak menyebutkan sanksi hukuman duniawi bagi orang yang murtad al-Qur'an menjatuhkan hukuman duniawi hanya pada beberapa jenis kriminal utama yang berkaitan dengan tindakan merugikan orang lain, seperti pembunuhan, pencurian, zina, menuduh zina tanpa bukti dan tindakan makar/terorisme. Tidak adanya sanksi hukuman duniawi bagi murtad itu sama dengan tidak adanya sanksi hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat, tidak berpuasa, tidak membayar zakat, tidak menutup aurat dan lain-lain. Jadi sanksi hukuman orang syirik atau murtad mendapatkan dosa besar dan tidak dapat di ampuni tetapi tidak mendapatkan hukuman duniawi.

2) Hadist

Sekiranya mengacu pada ayat-ayat diatas kesimpula itu tidak keliru. Menurut al-Quran tidak ada sanksi hukum bagi pelaku murtad dalam dunia. Namun bagi sebagian Ulama, bersandar pada al-Quran saja tidak cukup. Hadis lah yang menjadi sumber hukum keduanya yang berfungsi menjelaskan, mengelaborasi, memerinci sebuah ketentuan umum dalam al-Qur'an atau menjelaskan sesuatu yang belum diataur dalam al-Qur'an dalam kasus murtad ada dua hadis yang sering menjadi rujukan :

حدثنا أحمد بن عبدة، أنبأنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث : رجل زنى وهو محصن فرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه.

*“Dari Ibn Mas’ud berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak halal darah orang yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwasannya aku (Nabi) adalah utusan Allah, kecuali karena tiga perkara: orang yang membunuh jiwa atas jiwa, orang yang menikah kemudian berzina dan orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jama’ah”.*⁴⁰

حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا سفيان بن عيينه، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه.

*“Muhammad ibn al-Shahih menceritakan kepada kami, sufyan ibn uyaynah mengabarkan kepada kami, dari ayyub, dari ikrimah, dari ibn Abbas, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang menukarkan agamanya, maka bunuhlah dia”.*⁴¹

³⁸ An-Nahl (16) :106, Ali ‘Imran (3) :177

³⁹ Al-Baqarah (2) :217.

⁴⁰ Abdullah Shounhaji, Dkk, *Terjamah Sunan Ibn Majah*, Jilid III, (Semarang: CV. ASY SYIFA,1993), hlm, 332-333, No. 2533

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 335, No. 2535.

Ini adalah hadis yang akan di kritisi tapi bukan berarti untuk menolaknya. Hanya secara hermeneutik, suatu hadis lahir bukan dalam ruang hampa sejarah. Ada sejumlah faktor pendukung yang melatarbelakanginya. Dengan ini hadis yang mempunyai hukuman mati kepada pelaku murtad perlu di kritisi.

Di dalam hadis pertama disebutkan bahwa orang muslim boleh dibunuh karena tiga hal. Satu di antaranya dalam pemahaman ulama hukum adalah orang murtad. Sementara redaksional hadis tersebut berbunyi meninggalkan agamanya dan memisahkan (*at-Tarikh*) dirinya dari komunitas Islam (*al-Jama'ah*). Dalam versi lain, Sahih Muslim, menggunakan frase *al-Mufarriq li al-Jamaah*. Berarti pemisahan diri dari komunitas merupakan persyaratan sangat penting dalam kasus *riddah*. Sedangkan secara kontekstual, frase ini mengandung pengertian bahwa orang-orang muslim yang memisahkan diri atau meninggalkan orang-orang muslim lain untuk kemudian bergabung dengan pasukan musuh menunjukkan bahwa situasi pada saat itu adalah situasi perang. Mereka yang murtad dibunuh adalah bukan karena menukar agamanya. Akan tetapi lebih disebabkan oleh permusuhan. Pemahaman ini secara deduktif sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam surat al-Maidah:33 dan an-Nisa': 89. Namun jika yang murtad tersebut lari dan berlindung kedalam sejumlah suku yang tidak melakukan peperangan terhadap orang-orang Islam, maka ia tidak boleh dibunuh, sebagaimana dijelaskan dalam lanjutan ayat surat an-Nisa':90.⁴²

Syekh Mahmud Shaltut menegaskan bahwa permasalahan tindak pidana perlu ditinjau kembali. Alasannya adalah karena kebanyakan ulama berpandangan bahwa sanksi *hudud* tidak bisa dilakukan atas dasar *hadis ahad*.⁴³ Sementara kekufuran itu sendiri bukanlah penyebab halalnya darah seorang pelaku murtad. Akan tetapi yang menyebabkan halalnya darah pelaku murtad adalah sikap permusuhan dan perlawanannya (*al-muharabah wa al-'udwan*) terhadap kaum muslimin. Sementara makna fundamental al-Qur'an justru melarang pemaksaan terhadap agama,⁴⁴ dan bahkan ditegaskan kembali dalam QS. Yunus: 99.

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian dan Ruang Lingkungnya

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut "talak", atau "furqah". Talak berarti "membuka ikatan", "membatalkan perjanjian". "Furqah" berarti "bercerai", lawan dari

⁴² Abdur Rahman ibn Smith, "Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya", dalam *Jurnal al-Ahkam*, hlm. 190.

⁴³ *Hadis ahad* (*Khabar al-Ahad*), *ahad* menurut bahasa mempunyai arti satu. Dan *khabaru al-wahid* adalah *khabar* yang diriwayatkan oleh satu orang, sedangkan hadis ahad adalah hadis yang belum memenuhi syarat-syarat mutawatir, hadis ahad dibagi menjadi 3 macam yaitu; *Masyhur*, *Aziz* dan *Gharib*. Lihatlah 'Mahmud at-Tahan, *Taysir Mustalah al-Hadis*, (Lebanon: Dar al-Fikr,tt.), hlm. 21.

⁴⁴ Abdur Rahman ibn Smith, "Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya", dalam *Jurnal al-Ahkam*, hlm. 191.

“berkumpul”. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli fiqih yang berarti; perceraian antara suami dan isteri.⁴⁵

Perkataan talak dan furqah dalam istilah fiqih yang mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang suami atau isteri. Arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.⁴⁶

Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila antara suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya. Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan dan pembatalan baik secara hukum maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (istri/suami) meninggalkan keluarga.⁴⁷

Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.⁴⁸

Perceraian sering terjadi karena tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga mereka. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Kamal Mukhtar mengungkapkan pembicaraan yang berhubungan dengan masalah perceraian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁴⁹

1) Talak	6) Li'aan
2) Khuluk	7) Fasakh
3) Syiqaq	8) Ta'likut Talak
4) Ilaa'	9) 'Iddah
5) Zhihar	10) Ruju'

Sedangkan ditegaskan oleh Zahri Hamid dalam tulisannya, suatu perkawinan dapat pula berakhir oleh sebab diluar kehendak suami atau isteri, artinya bahwa bukan suami atau isteri yang menghendaki berakhirnya perkawinan itu, melainkan oleh kehendak atau sebab diluar keduanya. Berakhirnya perkawinan oleh sebab diluar kehendak suami dan isteri meliputi berakhirnya perkawinan oleh *hakam* dalam kasus syiqaq, berakhirnya perkawinan oleh sebab *hukum* menghendaknya, serta berakhirnya perkawinan oleh sebab *meninggalnya suami atau isteri* atau bersama-sama.⁵⁰

- 1) Berakhirnya Perkawinan oleh *Hakam*

⁴⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 156

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Widodo, 'Faktor-Faktor Serta Alasan Yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat', Dalam *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, hlm. 07

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 08.

⁴⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 160.

⁵⁰ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), hlm. 91-92.

Telah kita ketahui bahwa syiqaq adalah suatu proses dan krisis rumah tangga yang memuncak sedemikian rupa sehingga antara suami isteri terbelah menjadi dua pihak yang tidak mungkin bertemu pendapat dan mereka berdua tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Menurut ayat 35 surat 4 an-Nisa', jika terjadi syiqaq antara suami isteri, maka diutus seorang *hakam dari keluarga suami* dan seorang *hakam dari keluarga isteri* untuk mengadakan penelitian tentang sebab-sebab syiqaq itu dan berusaha mendamaikannya, atau mengambil kebijaksanaan perceraian kalau cerai itulah jalan yang sebaik-baiknya.

2) Berakhirnya Perkawinan oleh *Sebab Hukum*

Ada 3 kategori yang menjadi sebab berakhirnya perkawinan oleh sebab hukum ialah:

- a) Pembatalan perkawinan sebab terbukti terdapatnya larangan perkawinan antara suami dan isteri
- b) Pembatalan perkawinan karena kurang atau rusak salah satu atau beberapa rukunnya
- c) Difasidkannya perkawinan karena kurang atau rusak salah satu atau beberapa syarat pada rukun perkawinan
- d) Berakhirnya perkawinan karena terjadinya sesuatu yang menurut hukum merusak perkawinan, seperti masuk Islamnya suami atau isteri, murtadnya suami atau isteri, dan sebagainya.

3) Berakhirnya Perkawinan oleh *Sebab Meninggal Dunia*

Jika salah seorang dari suami atau isteri meninggal dunia, atau bersama-sama meninggal dunia semisal suami isteri bersama-sama dalam kapal yang tenggelam dalam laut, terbakarnya rumah yang didiami bersama, terjatuhnya kapal terbang yang dinaiki bersama suami isteri dan sebagainya, maka berakhirlah perkawinan mereka.

3. Putusnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang menyangkut Kompilasi Hukum Islam, ada baiknya dijelaskan lebih dahulu bagaimana pengertiannya "kompilasi" itu sendiri. hal dianggap perlu mengingat masih banyak masyarakat yang belum begitu faham tentang istilah tersebut. Kenyataan yang demikian disebabkan karena istilah ini memang kurang populer digunakan baik dalam pergaulan sehari-hari praktek, bahkan dalam kajian hukum sekalipun.

Istilah kompilasi diambil dari bahasa latin "Compilare" yang mempunyai arti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar, berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi "compilation" dalam bahasa inggris atau "compilatic" dalam bahasa belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi Kompilasi.⁵¹

Kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber

⁵¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 09

yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kagiatan ini semua bahan diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.⁵²

Kompilasi hukum Islam tidak secara tegas menyebutkan bagaimana pengertian Kompilasi Hukum Islam, dan sejarah penulisannya juga tidak tampak munculnya pemikiran yang kontroversial mengenai apa yang dimaksudkan dalam kompilasi itu. Dengan demikian, penulisan kompilasi tidak secara tegas menganut satu paham mengenai apa yang dibuatnya tersebut, namun kenyataan ini kelihatannya tidak mengundang reaksi dari pihak manapun.⁵³

Dari penjelasan tentang kompilasi diatas, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah Rangkuman dari berbagai pendapat ulama fiqih untuk di olah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Salah satu isi dari Kompilasi Hukum Islam adalah tentang Putusnya Perkawinan.

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Perceraian tidak hanya berakibat pada pasangan itu saja, tetapi akan berakibat pula pada pada pemeliharaan anak, harta bersama dan masalah pemberi nafkah. Pada saat ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui tata cara perceraian menurut hukum Islam. Masyarakat hanya mengetahui talak 1, talak 2 dan talak 3 tanpa mengetahui secara jelas maksud dari semuanya itu. UU perkawinan menyebutkan adanya 16 sebab perceraian. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban.⁵⁴

Pada penyebab perceraian, pengadilan memberikan legal formal, yaitu pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Surat talak tersebut diberikan dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2), dimana salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban. Sehingga, walaupun surat talak tersebut sah secara hukum, namun tidak ada kata kesepakatan diantara dua pihak untuk bercerai. Sebagai contoh, apabila seorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya, maka talak satu yang diucapkan tersebut harus dilegalkan terlebih dahulu di depan pengadilan. Karena pada dasarnya secara syar'i, talak tidak boleh diucapkan dalam keadaan emosi. Sehingga, melalui proses legalisasi di depan pengadilan, terdapat jenjang waktu bagi suami untuk merenungkan kembali talak yang telah terucap. Saat ini Pengadilan Agama memberikan sarana mediasi. Di pengadilan sekarang sudah dimulai sejak adanya Surat Edaran dari Mahkamah Agung No, 1 Tahun 2002. Seluruh hakim di Pengadilan Agama benar-benar harus mengoptimalkan lembaga mediasi tersebut.⁵⁵

Apabila setelah bercerai baik suami maupun istri ingin rujuk kembali, maka peristiwa rujuk tersebut akan tercatat dalam lembar terakhir buku nikah. Demikian halnya apabila para pihak memiliki perjanjian pranikah, maka perjanjian tersebut akan tercatat dalam lembar terakhir buku nikah itu juga, dengan sepengetahuan instansi yang berwenang, yaitu KUA.

⁵² *Ibid*, hlm. 10

⁵³ *Ibid*, hlm. 12

⁵⁴ Widodo, "Faktor-Faktor serta Alasan yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat", dalam *Jurnal Hukum*, hlm. 09.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

Meskipun Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas – asas Hukum Islam.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Uu. No. 1/197 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun berdasarkan keputusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. yaitu pasal 38 disebutkan : perkawinan dapat putus karena ; a. perceraian, b. perceraian atas putusan dari pengadilan.⁵⁶ Sebagaimana dijelaskan juga dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam juga mengikuti alur yang digunakan oleh undang-undang Perkawinan, meskipun pasal-pasal yang digunakan lebih terperinci.⁵⁷ Dari pasal 113 Kompilasi Hukum Islam diatas, kemudian diertegas lagi dengan pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian; *Pertama*, Perceraian yang disebabkan talak dan *Kedua*, perceraian yang disebabkan gugatan perceraian. Adapun kedua bentuk perceraian tersebut harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 115.⁵⁸ “perceraian hanya data dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁵⁹

Ketentuan tentang keharusan perceraian di Pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apapun, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya *talaq* adalah hak mutlak seorang suami dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana keadaan keadaan perkawinannya adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan public.⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut, adapun perceraian dapat terjadi karna alasan-alasan (KHI, Pasal 116 huruf h) ini.⁶¹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk atau pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

⁵⁶ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 216

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama, 2000), hlm. 55.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 227

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm, 55

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm 227-228.

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 56.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Meskipun dalam Undang-undang Perkawinan tidak menyinggung Murtad sebagai alasan perceraian, namun dalam Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian ketika perceraian tersebut menyebabkan ketidakrukunan dalam berumah tangga sebagaimana yang disebutkan pada huruf “h”.

Dari keterangan pasal KHI diatas (pasal 116 huruf h), maka disebutkan bahwa salah satu sebab terjadinya perceraian adalah factor *riddah*. Ketika salah satu pihak murtad, maka perkawinan tersebut tidak langsung putus. Perceraian merupakan delik aduan. Sehingga apabila salah satu pasangan tidak keberatan apabila pasangannya murtad, maka perkawinan tersebut dapat terus berlanjut. Pengadilan agama hanya dapat memproses perceraian apabila salah satu pihak mengajukan permohonan ataupun gugatan cerai.⁶²

Adapun latar belakang munculnya alasan perceraian pada huruf “h” adalah karena banyaknya para hakim Pengadilan Agama yang menolak kasus-kasus Gugatan Perceraian karena Murtad, para hakim beralasan bahwa dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tidak menyebutkan murtad sebagai alasan perceraian.⁶³

Akibat hukum murtad sudah pasti akan berdampak pada orang-orang mendapatkan warisan dari keluarga, antara lain :⁶⁴

- *Pertama*, karena seorang hamba sahaya atau budak yang berarti seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Hal demikian sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 75, “Hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu”.

⁶² Almanaar, <http://almanaar.wordpress.com/2007/12/06/perceraian-menurut-uu-perkawinan/> (diakses 21desember 2018)

⁶³ Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Islam Dalam Sistem Hukum Nasioanal*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 65.

⁶⁴ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 142-144.

- *Kedua*, karena membunuh yaitu apabila seorang Ahli waris membunuh Pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, “Pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya”.
- *Ketiga*, karena perbedaan agama yang mana orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia orang muslim, sedangkan Ahli warisnya bukan muslim, para ahli tersebut tidak berhak mendapatkan harta waris. Hal demikian sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Orang islam tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang Islam”.
- *Keempat*, karena *Murtad* yang berarti orang yang keluar dari agama Islam, tidak dapat warisan dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam dan sebaliknya ia pun tidak mewarisi kepada yang masih beragama Islam.¹⁸ Mengenai murtad, dapat merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid r.a, Rasulullah bersabda, “Tidak boleh orang Muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak boleh orang kafir mewarisi orang Muslim”.

4. Analisis *Maqashid As-Syari'ah*

Kajian teori *maqashid as-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid as-syari'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqashid as-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid as-syari'ah* (tujuan hukum).

Selanjutnya, melihat konteks Peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 secara tegas menunjuk kepada hukum agama sebagai syarat keabsahan suatu perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU 1/1974. Oleh karena itu, keberadaan dan keberlakuan hukum Islam dalam mengatur perkawinan antar umat muslim, harus dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus atau perkara perkawinan. Ketentuan hukum Islam yang mengatur perkawinan antara lain terdapat dalam kitab suci al-Qur'an, Hadis Rasulullah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum sekuler. Karena, dalam hukum Islam terkandung nilai-nilai moral dan asas-asas yang merupakan perintah Allah

swt, sehingga penafsiran dan penggunaannya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional atau logika semata-mata, tetapi juga harus digali apa yang menjadi asal-usul atau riwayat lahirnya surat dalam al-Qur'an yang dijadikan dasar acuan dan konteks atau aktualitasnya dengan moralitas agama Islam saat ini. Hukum Islam telah berkembang ke arah yang lebih baik ditinjau dari aspek pengaturannya. Ketentuan hukum materil yang diatur dalam hukum Islam telah mengakomodasi kebutuhan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kokoh, kuat maupun teguh. Telah jelas al-Qur'an menjelaskan tentang status ikatan atau transaksi ('*aqd*) yang diikat antara suami dan isteri, yang diikat dengan apa yang disebut *ijab* dan *qabul* (perkawinan). Dalam hal ini al-Qur'an menyebutkan bahwa ikatan perkawinan melebihi ikatan transaksi-transaksi lain. Dalam hal ini al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai satu perjanjian yang (مِيثَاقًا غَلِيظًا). Berdasarkan firman Allah swt dalam Surat an-Nisa' (4); 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat".

Dari ayat di atas, maka jelas secara tidak langsung ikatan perkawinan sangat kuat mengalahi ikatan-ikatan transaksi seperti ikatan jual-beli dan lain-lain. Kurang lengkap apabila suatu ikatan yang kokoh tidak dilengkapi akan asas-asas tujuan dari suatu perkawinan. Berdasarkan surat ar-Rum (30); 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ

لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

سكينة berasal dari kata سكن yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketenteraman.⁶⁵ Dari ayat ini jelas bahwa hubungan suami dan isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang dan bahwa ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lainnya, hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani dan kasih sayang. Dengan demikian asumsinya adalah bahwa

⁶⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, hlm. 43.

pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang.

Begitupun Kompilasi Hukum Islam, yang mengedepankan suatu kebaikan dalam perkawinan, pada pasal 3 yang berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.” Namun demikian, dalam KHI hanya mendapatkan bahwa murtad menjadi suatu alasan mengajukan cerai, padahal kalau dilihat dalam fiqh Islam, Jumhur Ulama mengatakan jika salah satu pasangan suami atau isteri murtad maka nikahnya menjadi fasakh bukan talak.

Perkawinan dapat dilanjutkan apabila tidak ada perkara yang merusak ikatan perkawinan tersebut. Dalam pasal 116 huruf “h” KHI disebutkan bahwa salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Dari pasal tersebut sangat jelas sekali bahwa murtadnya seorang suami atau isteri tidak menjadi inti dari alasan putusnya sebuah perkawinan. Perkawinan bisa dianggap batal jika dengan adanya murtad tersebut menjadi ketidakrukunan dalam keluarga. Meskipun begitu, apabila salah satu pasangan tidak keberatan apabila pasangannya murtad, maka perkawinan tersebut dapat terus berlanjut. Pengadilan agama hanya dapat memproses perceraian apabila salah satu pihak mengajukan permohonan ataupun gugatan cerai.

Jadi kalau dilihat dari pengertian pasal tersebut terlihat sewenang-wenang dalam beragama. Ketika seorang dengan leluasa pindah agama dari Islam keagama sebelumnya atau keagama baru, seakan-akan mengisyaratkan bahwa dalam KHI hanya mengisyaratkan satu agama sebagai formalitas belaka, yang selanjutnya terserah mau pindah agama atau tidak. Tidak ada pengawalan ketat dalam mengatur akan kehormatan agama. Padahal dalam Islam secara teologis jelas hukuman bagi pelaku murtad adalah diancam hukuman mati.

Meskipun seperti itu, terkadang perpindahan agama dari agama satu keagama yang lain dikaitkan dengan kebebasan beragama yang menjadi landasan Negara Indonesia, yang diwujudkan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Sehingga dapat dipahami bahwa agama seakan akan masalah internal individu yang tidak bisa dipaksa siapapun, dan tidak ada intervensi terhadap agama.

Maka dapat disimpulkan penulis bahwa, tulisan pada Pasal 116 huruf h bukan tidak beralasan, tetapi memang menjadi permasalahan yang kompleks dalam kehidupan Indonesia yang menganut asas kebebasan beragama. Dimana Undang-undang mengatur tentang kebebasan beragama pada Pasal 28-29.

Namun harusnya kebebasan beragama diartikan sebagai kebebasan beragama yang bertanggungjawab, yang masih mentaati norma aturan yang ada. Sehingga akan berdampak menimbulkan agama-agama lain maupun perintah dalam menjalankan agama yang dipilihnya.⁶⁶ Setiap orang harusnya memahami agama adalah sebuah pilihan dengan segala

⁶⁶ Tri Wahyu Hidayati, *Apakah Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama ? (Prespektif Hukum Islam Dan HAM)*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2008), hlm. 127.

konsekuensi dan tanggung jawab yang harus diterima dengan sukarela bagi pemeluk-pemeluknya.

a. Pemetaan Maslahat Murtad Sebagai Alasan Perceraian

Ketika sebuah perintah yang jelas dalam nash al-Qur'an atau Hadis dari sebuah hukum, maka disitulah sebuah kemaslahatan. Dalam perkawinan jika salah satu pasangan murtad suami atau isteri dan masih merasakan ketentraman dalam berumah tangga, dan disana masih terdapat suatu kemaslahatan untuk tetap hidup bersama menjalin kasih sayang hingga akhir hayat. Selain juga ada kemaslahatan lain terkait dengan pemeliharaan anaknya yang dihasilkan dari perkawinan (masuk dalam kategori tujuan perkawinan). Menurut penulis kemaslahatan disini bersifat *Hajiyat* dikarenakan, tidak semua suatu ketentraman atau kemaslahatan dalam berumah tangga harus diambil melalui kondisi murtad, karena ketiadaannya tidak merusak perkawinan. Hal itu hanya dialami oleh kalangan tertentu bukan mayoritas, seperti artis Novita Angie bersama Sapto Haryo Rajasa dan lain-lain. Ditambah cangkupan dalam kategori masalah ini hanya bersifat *Khasah*, orang-orang tertentu yang bisa memberikan atau menerapkan suatu nilai-nilai Toleransi dalam berumah tangga untuk pasangan suami isteri.

b. Pemetaan Mafsadat Murtad Sebagai Alasan Perceraian

Pelaksanaan perintah agama adalah kunci dari kehidupan agama, jika ada sebuah agama lalu tidak menjalankan suatu ajaran-ajaran dalam agamanya. Maka sesungguhnya agama itu telah hancur.

Dalam Islam menjaga agama adalah merupakan suatu kemaslahatan yang paling utama. Apabila bertentangan dengan maslahat agama maka maslahat yang lain terhapuskan. Menjaga agama itu bisa dilakukan dengan mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Maka kehormatan agama perlu dipertahankan. Hal ini telah menjadi suatu kesepakatan Ulama menjadikan agama sebagai prioritas yang utama.

Masuk pada konteks murtad sebagai alasan perceraian, terlihat sudah akan kemafsadatan yang terjadi. Murtad yang jelas berpaling dari agama Islam kepada agama yang lain, maka telah jelas dia mengingkari akan suatu prioritas yang paling utama dalam keutamaan menjaga agama yaitu *hifz ad-Din*. Ditambah akan lebih mudah, tentram, dan harmonis apabila dalam berumah tangga memiliki satu keyakinan agama yang sama.

Tidak hanya itu, tampak jelas jika regenerasi umat Islam bermula dari perkawinan, maka ketika perbedaan agama terjadi dalam rumah tangga, maka status keberagaman anak dan keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut menjadi tidak jelas. Contoh seorang ayah atau ibu yang beragama Islam pada akhirnya tidak bisa memaksakan anaknya untuk beragama Islam, mengingat kewajiban pengasuhan ada pada kedua orang tuanya yang berbeda agama. Sehingga doktrin keagamaan yang seharusnya didapatkan

dari anak orang tuanya terabaikan dan pendidikan moral yang berlandaskan dari agama untuk anaknya telantar. Hal ini masuk bertentangan dengan *hifz an-Nasl*.

Begitu juga berkaitan dengan hukum kewarisan, disini muncullah suatu pergejolakan akan hak waris yang diterima oleh ahli waris yang apabila suami atau isterinya memiliki orang tua muslim tetapi anaknya berbeda agama, telah jelas pada KHI Pasal 171 ahli waris yang berbeda agama akan terhalang mendapatkan warisan, meskipun diganti dengan wasiat wajibah. Oleh karena itu untuk menjaga harta pada prinsip *hifz al-Mal*.

Menurut penulis kemafsadatan ini bersifat *Dharuriyah* karena mencakup *al-Kulliyatu al-Khamsah* ditambah dengan dikuatkannya oleh *qaidah fiqih* yang berbunyi “*keharusan memilih melakukan kemudharatan yang khusus sebagai upaya menolak kemudharatan yang umum*” jadi kemudharatan yang ditimbulkan dari pelaku murtad apabila tidak diberikan batasan-batasan dalam undang-undang dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan yang luas. Seperti berpindah agama dengan seenaknya dan dampak-dampak lain.

c. Perbandingan Kemafsadatan dan Kemaslahatan

Kedamaian, ketentraman, ketenangan (*sakinah*) menjadi landasan dasar yang paling penting dalam menjalankan kehidupan berumah tangga (*illat*). Apabila *sakinah* tidak dapat dicapai maka putuslah perkawinan dalam ketentuan apabila dilaporkan ke pengadilan.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis akan membagi kemafsadatan maupun kemaslahatan Murtad (*ar-Riddah*) Menjadi Alasan Perceraian (*at-Talaq*), antara lain :

- a. Tingkat kemaslahatan bersifat *hajiyat*, dikarenakan untuk tercapainya tujuan perkawinan tidak harus di dapatkan dengan murtad, sekalipun memperkuat akan rasa toleransi
- b. Tingkat kemafsadatan bersifat *dharuriyat*, dikarenakan melampaui akan 5 pokok *al-kulliyat al-khamsah*. Antara lain *hifz ad-Din*, *hifz an-Nasl*, dan *hifz al-Mal*.
- c. Lingkup kemaslahatannya bersifat *Khassah*, orang-orang tertentu.
- d. Lingkup kemafsadatannya bersifat ‘*Ammah*, membahayakan apabila tidak ada tambahan batasan-batasan atau rincian pada KHI Pasal 116 huruf “h”.

Dapat penulis simpulkan jika dilihat dari hierarki *Maqasid as-Syari’ah* yaitu *dharuriyat*, lalu *hajiyat*, dan lalu *tahsiniyat*, kemudian berlanjut dari tingkatan cangkupannya baik itu mafsadat maupun maslahat. Maka *dharuriyat* lah yang lebih tinggi begitupun cangkupannya berdasarkan qoidah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح menolak *mafsadat* (*mudharat*) lebih utama (didahulukan) daripada mendahulukan maslahat.

D. Kesimpulan

Dari semua pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Murtad adalah berpindah agama dari Islam ke agama yang lain atau ke agama sebelumnya. Sudah banyak orang-orang yang melakukan berumah tangga suami dan

isteri tapi salah satu dari mereka ada yang murtad, meskipun seperti itu keharmonisan dan kerukunan tetap terjaga hingga sekarang. Ketentuan murtad diatur secara jelas dalam KHI khususnya dalam masalah perceraian pada pasal 116 huruf “h” maka disebutkan bahwa salah satu sebab terjadinya perceraian adalah factor murtad. Ketika salah satu pihak murtad, maka perkawinan tersebut tidak langsung putus. Apabila tidak dilaporkan pada Pengadilan. Alasan kenapa KHI mengatur Murtad menjadi alasan perceraian dikarenakan bahwa dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tidak menyebutkan murtad sebagai alasan perceraian.

2. Maqasid as-Syari’ah menjadi pisau untuk tema ini, dengan dipetakan melihat dari tingkat maslahat dan mafsadatnya, antara lain; maslahatnya dalam tingkatan hajiyyat dikarenakan sekalipun dalam berkeluarga suami atau isterinya murtad masih menimbulkan kemaslahatan yaitu ketentraman dan keharmonisan dalam berumah tangga dengan didasari rasa toleransi sekalipun keharmonisan dalam berkeluarga tidak harus dilalui melalui murtad, cangkupannya masuk dalam kategori *Khassah*. Sedangkan mudharatnya dalam tingkatan dharuriyah dikarenakan banyak sekali kemafsadatan yang dilakukan orang murtad dalam perkawinan hingga melanggar *al-kulliyat al-khamsah*, lalu cangkupannya masuk dalam kategori ‘*ammah* karna tidak memberikan batasan-batasan secara spesifik dikhawatirkan menimbulkan kemudahan dalam peralihan/perpindahan agama. Jika dilihat dari tingkatan hierarki maqasid as-syari’ah maka dharuriyah yang lebih tinggi dengan diperkuat bersama qaidah fiqh “menolak mafsadat (mudharat) lebih utama atau didahulukan daripada mendahulukan maslahat”.

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku**

Abdullah, Shounhaji, Dkk, *Terjamah Sunan Ibn Majah*, Jilid III, (Semarang: CV. ASY SYIFA,1993).

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).

As-Sabiq, Muhammad Sayid, *Fiqh Sunnah*, (Lubnan: Dar KutubArabi, 2009).

At-Tahan, Mahmud, *Taysir Mustalah al-Hadis*, (Lebanon: Dar al-Fikr,tt.)

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Bairut: Dar al-Fikr, 1985).

Bisri, Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Islam Dalam Sistem Hukum Nasioanal*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013).

Daniel S. Lev. *Peradilan Agama Islam di Indonesia, terjemahan H. Zaini Ahmad Nuh.* (Jakarta: Intermasa, 1980).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama, 2000).

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1978).

Hidayati, Tri Wahyu, *Apakah Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama ? (Prespektif Hukum Islam Dan HAM)*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2008).

Irfan, Muhammad Nurul, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013).

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997).

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010).

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*. Yogyakarta: ACAdemiA, 2013.

Nuruddin, Amir, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*, Juz III, (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

- **Artikel Jurnal**

ibn Smith, Abdur Rahman,. “, ‘Rekontruksi Makna Murtad Dan Implikasi Hukumnya’.” *dalam Jurnal al-Ahkam, jurusan pemikiran hukum Islam*, Vol. 22, Nomor. 2, Oktober 2012.

Zailia, Siti, “Siti Zailia, ‘Murtad Dalam Prespektif Syafi’i Dan Hanafi’, Dalam Jurnal Istimbath, Fakultas Syari’ah, Vol. XIV, Nomor. 15, Juni 2015” .

Moqsith, Abd.”Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam”, Dalam Jurnal Ahkam, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Vol. XIII, Nomor. 2, Juli 2013” .

“Diana Aristanti, Dkk, ‘Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 02449/Pdt. G/2016/PA.Pal),’ dalam *Jurnal Lentera Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember Vol 2 (January 2017): 18.”.

Widodo, ‘Faktor-Faktor Serta Alasan Yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat’, Dalam *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta”.

- **Internet**

Almanaar, <http://almanaar.wordpress.com/2007/12/06/perceraian-menurut-uu-perkawinan/> (diakses 21 desember 2018)

Winnetnews, <https://www.google.com/amp/s/m.winnetnews.com/menikah-beda-agama-dan-berpindah-agama-ini-tetap-awet/> (diakses 21 desember 2018).